

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGAWASAN SUKU BUNGA PINJAMAN

PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING* OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG

DI INDONESIA DAN SINGAPURA

INTISARI

Oleh:

Abraham Mulia Kurnia¹ dan Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.²

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana perbandingan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dari Perusahaan *Peer to Peer Lending* di Negara Indonesia dan Singapura ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara tersebut, serta mengetahui dan mengkaji peran dari lembaga berwenang dalam melakukan pengawasan dan meregulasi *Fintech* dalam melakukan pengawasan penetapan suku bunga kegiatan *Peer to Peer Lending* di Negara Indonesia dan Singapura.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif. dengan sumber penelitian hukum yang diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini menunjukkan bahwa terdapat banyak persamaan dan beberapa perbedaan akan aturan-aturan dan peran dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam kegiatan *Fintech Peer to Peer Lending* yang ada di Indonesia dan Singapura. Bahwa ternyata perbedaan yang ada selain terdapat pada substansi hukum yang ada juga kepada tingkat pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang ada, tingkat literasi, dan juga perbedaan budaya finansial yang ada di masyarakat umum di Indonesia dan Singapura.

Kata Kunci: *Fintech, Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum, POJK, Singapura

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGAWASAN SUKU BUNGA
PINJAMAN**

**PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING* OLEH LEMBAGA YANG
BERWENANG
DI INDONESIA DAN SINGAPURA**

ABSTRACT

By:

Abraham Mulia Kurnia¹ and Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.²

The purpose of writing this thesis is to find out and analyze how the legal protection for recipients of loans from Peer to Peer Lending Companies in Indonesia and Singapore compares in terms of the laws and regulations in both countries, as well as to know and examine the role of these institutions in supervising and regulating Fintech in supervising the determination of interest rates for Peer to Peer Lending activities in Indonesia and Singapore.

This research is a descriptive legal research, with the type of normative juridical research. with legal research sources obtained from the literature not from the field. In normative legal research, library materials are the basic materials which in research are generally referred to as secondary data sources.

The results of the research conducted by this author indicate that there are many similarities and some differences in the rules and roles of authorized institutions in Fintech Peer to Peer Lending activities in Indonesia and Singapore. Whereas it turns out that the differences exist in addition to the existing legal substance as well as the level of implementation of existing regulations, literacy levels, and also differences in financial culture that exist in the general public in Indonesia and Singapore.

Keywords: Justice Principle, Peer to Peer Lending, Financial Technology.